



Jurnal Environmental Science

Volume 6 Nomor 1 Oktober 2023

p-ISSN : 2654-4490 dan e-ISSN : 2654-9085

Homepage at : ojs.unm.ac.id/JES

E-mail : jes@unm.ac.id

COMMUNITY BASED TOURISM DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI TAMAN WISATA ALAM NASIONAL BANTIMURUNG MAROS SULAWESI SELATAN INDONESIA

***Erman Syarif¹, Sulaiman Zhiddiq², Darwis Falah³**

¹²³ Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Makassar, 2023, Indonesia.

E-mail: ermansyarif@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) model pengembangan *Community Based Tourism* dan, 2) Peranan *Community Based Tourism* dalam mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Strategi verifikasi data dengan reduksi data, kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada peran atau partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. 2) pariwisata berbasis masyarakat memiliki peranan yang besar dalam pengembangan pariwisata khususnya berkaitan dengan mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Keyword: Pariwisata; Berkelanjutan; Bantimurung

ABSTRACT

This research aims to determine: 1) the *Community Based Tourism* development model and, 2) the role of *Community Based Tourism* in realizing Sustainable Tourism. This type of research is qualitative research using a phenomenological approach. This research was carried out in Maros Regency, South Sulawesi, Indonesia. The data source in this research is informants. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. Data verification strategy with data reduction, data categorization, data display, and drawing conclusions. The research results show: 1) the community-based tourism development model emphasizes the role or participation of the community in developing tourism. 2) community-based tourism has a large role in tourism development, especially in relation to realizing sustainable tourism.

Keywords: Tourism; Sustainable; Bantimurung

PENDAHULUAN

Munculnya fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kritik atas pengelolaan wisata yang dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan dipandang kurang mampu memberdayakan masyarakat. Zielinski, S., Jeong, Y., & Milanés, C. B. (2021) Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism/CBT) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang memerlukan partisipasi masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu (Amalyah, R. et al. 2016).

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas (CIFOR, 2004). Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia, 2009).

Penerapan pariwisata berbasis masyarakat dianggap mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka (Dolezal, C., & Novelli, M., 2020). Salah satu kawasan wisata alam yang terdapat di Sulawesi Selatan adalah kawasan wisata alam Bantimurung yang termasuk dalam Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kawasan wisata alam Bantimurung merupakan sumber pendapatan andalan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Sesuai pembukuan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2014, bahwa pendapatan dari kawasan wisata alam Bantimurung sebesar Rp 30 Miliar (Mayzona.com, 2015). Pendapatan tersebut berasal dari segmen pasar yang beragam, pengelola belum menasar segmen pasar yang potensial sehingga pendapatan tersebut belum optimal. Sesuai dengan strategi pemasaran, pengelola kawasan wisata alam Bantimurung selayaknya melaksanakan pemasaran sasaran, yaitu mempersempit pasar massal menjadi segmen-segmen.

Kawasan wisata alam Bantimurung yang sebelumnya merupakan kawasan Taman Wisata Alam yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/Um/3/1981 tanggal 30 Maret 1981 dengan luas \pm 118 ha. Adapun keunikan dari Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara,

diantaranya : air terjun, karst, goa-goa dengan stalaknit dan stalakmit yang indah, dan yang paling dikenal adalah kupu-kupu. Taman Nasional ini memang mengandalkan kupu-kupu sebagai daya tarik utamanya. Kawasan wisata alam Bantimurung menawarkan objek wisata air terjun, sungai untuk kegiatan river tubing, goa batu, bukit karst dan flora fauna. Objek daya tarik wisata tersebut merupakan bentang alami yang dilengkapi sarana penunjang wisata. Adapun penambahan sarana penunjang wisata tersebut tidak mengurangi nilai estetika objek wisata.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam program pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi dan ekologi dimaksud di atas adalah melalui sektor pariwisata. Berdasarkan Renstra (Kemenparekraf, 2020) menyebutkan bahwa capaian kontribusi sector pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami peningkatan dan pencapaian target sehingga pariwisata disebut sebagai leading sector penyumbang devisa negara. Tak hanya itu, pariwisata memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial karena mampu memberdayakan masyarakat lokal, sumber daya alam, dan kebudayaan. Hal ini tentunya sesuai dengan pernyataan (Friedmann, 1992) bahwa pemberdayaan adalah konsep multidimensi yang meliputi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan psikologis. Oleh karena itu, salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembangunan pariwisata adalah pariwisata berbasis masyarakat. Melalui metode ini, pariwisata berbasis masyarakat, menjadikan masyarakat lokal terlibat langsung untuk menjadi ikon atau subjek pendorong pembangunan pariwisata.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pembangunan berkelanjutan, yang tidak menempatkan pemerintah atau investor swasta sebagai pelaku utama, melainkan komunitas lokal sebagai pemegang peran penting dalam kemajuan sektor pariwisata. CBT memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mengembangkan manajemen sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat (Hausler, 2005). Sasaran utama dari konsep CBT adalah pengembangan kepariwisataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Arifin, 2017).

Studi ini berasumsi bahwa penerapan CBT taman wisata alam nasional bantimurung maros bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam dan melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai unsur atau komunitas dalam setiap kegiatannya dengan mengacu pada prinsip dasar dari UNEP dan WTO (Suansri, 2003). Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan CBT, yang dilakukan dengan kekompakan dan kerja sama antar warga, merupakan modal sosial dalam mencapai mencapai tujuan bersama. Modal sosial yang melibatkan semua pihak pelaku CBT ini berkolaboratif dengan antar lembaga untuk mengelola potensi desa agar lebih terjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Untuk menyatukan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perubahan maka diperlukanlah adanya ikatan sosial antar warga. Komitmen dan kerjasama menjadi faktor terpenting untuk membangun inisiatif masyarakat. Bahkan hal ini juga sebagai sarana untuk berkomunikasi, berbagi pengetahuan, dan menggabungkan berbagai ide-ide pikiran secara kolektif. Modal sosial dapat menyatukan kebutuhan yang berbeda, menghubungkan persebaran informasi, dan memperkuat identitas suatu masyarakat (Putnam, 2000).

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Model pengembangan Community Based Tourism, dan 2) Peranan Community Based Tourism dalam mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Strategi verifikasi data dengan reduksi data, kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Tabel 1. Informan Penelitian

| Informan | Jumlah | Tehnik |
|--------------------------|--------|--------------------|
| Wistawan | 45 | Kuisisioner |
| Masyarakat Lokal | 10 | Wawancara Mendalam |
| Pengusaha wisata | 5 | Wawancara Mendalam |
| Operator Objek Wisata | 8 | Wawancara Mendalam |
| Pemerintah | 5 | Wawancara Mendalam |
| Lembaga Lokal Masyarakat | 1 | Wawancara Mendalam |
| Jumlah Informan | 74 | |

sustainable development (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2016). Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan adalah bentuk pariwisata yang berupaya memberdayakan masyarakat untuk mengelola pertumbuhan pariwisata dan mencapai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, dan mencakup pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan pariwisata berbasis masyarakat juga dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata merupakan unsur yang utama berkaitan dengan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini (Nagy, K. X. H., & Segui, A. E., 2020).



Gambar. 2 Kondisi Taman Wisata Nasional Bantimurung

Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini juga dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan khususnya dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan tegas menentukan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif dan dalam ketentuan Pasal 5 dapat diketahui prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan yakni salah satunya adalah memberdayakan masyarakat setempat yang sesuai dan sejalan dengan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Bahkan selain dalam undang-undang tentang kepariwisataan model pengembangan pariwisata

berbasis masyarakat ini juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/Mkp/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pariwisata berbasis masyarakat menekankan peran atau partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Selain hal tersebut dapat diketahui bahwa begitu pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya tren baru pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2016). Pariwisata berbasis masyarakat tentu saja dapat membuka lapangan kerja baru khususnya berkaitan dengan pariwisata bahkan dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Bahkan dari segi sosial salah satunya tentu saja dapat meningkatkan kualitas hidup, selain hal tersebut dapat dilihat pula dari segi politik yakni memungkinkannya adanya partisipasi dari masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata bahkan dari segi lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan konservasi dan sebagainya. Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada (Rahayu, Dewi, & Fitriana, 2016).

Community Based Tourism merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pariwisata. Suansri (2003) mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan Community Based Tourism. Prinsip tersebut antara lain: 1) Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata, 2) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek, 3) Mengembangkan kebanggaan komunitas, 4) Mengembangkan kualitas hidup komunitas, 5) Menjamin keberlanjutan lingkungan, 6) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, 7) Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, 8) Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia, 9) Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas, 10) Berperan dalam menentukan persentase pendapatan, dan (11) menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Tabel 2. Tahapan Pengembangan Community Based Tourism

| Tahapan Pengembangan Community Based Tourism | Informasi |
|---|---|
| Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk kegiatan wisata | 1. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata 2. Peran wisata terhadap masyarakat 3. Situasi dan kondisi masyarakat sekitar kawasan wisata |
| Mengidentifikasi kemampuan dan persiapan komunitas di masyarakat | 1. Potensi wisata yang akan dikembangkan dan dipromosikan 2. Kegiatan atau sosialisasi yang sudah dilaksanakan |

| | |
|---|--|
| | 3. Persiapan yang sudah dilaksanakan oleh komunitas setempat |
| Menganalisis kepemimpinan dan struktur organisasi di kawasan wisata | Bagaimana kepemimpinan dan struktur organisasi di Kawasan Taman Wisata Nasional Bantimurung |
| Memperiapkan dan mengembangkan organisasi yang ada | Peran pada setiap organisasi yang terkait |
| Menganalisis pengembangan kemitraan yang sudah dilaksanakan | Kemitraan dan pengembangannya dalam pengelolaan wisata |
| Menganalisis pendekatan terpadu yang sudah dijalankan | Pendekatan terpadu yang sudah dan belum dijalankan |
| Menganalisis rencana dan desain produk | Rencana dan desain produk yang sudah dan akan disusun |
| Menganalisis permintaan pasar dan pemasaran | 1. Permintaan pasar dan strategi pemasaran kawasan yang sudah dan akan dilakukan 2. Strategi pemasaran yang sudah dan akan dilakukan. |
| Menganalisis proses implementasi dan monitoring kawasan wisata | Kegiatan implementasi serta monitoring yang dilakukan pada kawasan wisata oleh para stakeholder. |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bantimurung kabupaten Maros telah memiliki kesiapan yang baik untuk dapat mengembangkan kegiatan wisata berbasis masyarakat. Berdasarkan 9 tahapan yang diperlukan, masyarakat Bantimurung sudah mencapai tahapan ke 6 (masyarakat siap untuk mengembangkan wisata diwilayahnya, masyarakat sudah memiliki kemampuan dasar untuk pengembangan wisata, ada kepemimpinan dan struktur organisasi pengelola wisata, upaya pengembangan organisasi pengelola wisata, dan pengembangan kemitraan, mengadopsi pendekatan terpadu). Prinsip *community based tourism* yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan wisata alam Bantimurung yakni mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata, melibatkan masyarakat dalam setiap aspek, mempromosikan kebanggaan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan, menjamin keberlanjutan lingkungan, melindungi keunikan karakter dan budaya masyarakat local, mendorong pembelajaran lintas budaya, menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia, mendistribusikan keuntungan atau manfaat secara adil diantara anggota masyarakat, memberikan kontribusi dengan presentase dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat dan menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melibatkan dukungan masyarakat (dan eksternal) untuk usaha pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara kolektif (Adikampana, 2017). Model pendekatan masyarakat menjadi standar baku bagi proses pengembangan pariwisata, dimana melibatkan masyarakat didalamnya adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksesan produk wisata (Priatmoko et al, 2021).

Upaya pengembangan destinasi pariwisata dilakukan : 1) program pengembangan pariwisata, 2) pengembangan pemasaran pariwisata, dan 3) pengembangan kemitraan pariwisata. Pengembangan destinasi pariwisata merupakan upaya untuk menata kawasan, dan kondisi obyek wisata, serta menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana pariwisata. Pelaksanaan program ini dicapai melalui kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan melalui penyediaan fasilitas layanan,

pengembangan daerah tujuan wisata, peningkatan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan retribusi obyek wisata berupa pembayaran upah pungut kepada kelompok pemungut retribusi di obyek wisata, serta pembayaran premi asuransi pengunjung obyek wisata dan penyusunan perangkat hukum dan perencanaan pariwisata.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam pengembangan *Community Based Tourism*, yaitu: (1) Peningkatan partisipasi seluruh stakeholders termasuk masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata alam nasional bantimurung. (2) Peningkatan anggaran guna pengembangan pariwisata melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah. (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pendukung sektor pariwisata. (4) Peningkatan upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata melalui pelatihan dan workshop. (5) Telah mengembangkan model pengembangan *Community Based Tourism*, (6) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dan (7) Program pengembangan kemitraan.

Pemerintah Kabupaten Maros menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan *Community Based Tourism*. Hambatan tersebut antara lain: (1) sumber dana yang tidak mencukupi, (2) kurangnya jumlah sumber daya manusia di bidang pengembangan pariwisata, (3) kesiapan masyarakat dalam menyikapi pentingnya pengembangan pariwisata, mayoritas masyarakat yang hidup sebagai petani cenderung apatis dan kurang sadar akan hal tersebut, akibatnya inovasi dan kreasi dari pihak masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata tidak dapat optimal, dan (4) dukungan dari pihak swasta atau pengusaha wisata juga masih minim, kurangnya investor yang mau untuk turut mengembangkan potensi *Community Based Tourism*.

Pengembangan *Community Based Tourism* di Kabupaten Maros akan bermanfaat dalam menciptakan kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, pelestarian lingkungan dan budaya setempat sehingga akan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Model pengembangan *Community Based Tourism* sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Maros dirumuskan dengan berdasarkan pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada. Model pengembangan *Community Based Tourism* tersebut akan berhasil apabila semua komponen tersedia dan mendapat dukungan dari stakeholders. Dukungan tersebut berupa keberpihakan dalam bentuk program dan regulasi, modal usaha, kemitraan, maupun keterlibatan masyarakat dan infrastruktur. *Community Based Tourism* merupakan sebuah konsep pariwisata yang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat atas kemajuan pariwisata di Kabupaten Maros.

2. Peranan *Community Based Tourism* dalam mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat sebagai pengelola dalam pembangunan kepariwisataan yang ada (Musaddad, Rahayu, Pratama, Supraptiningsih, & Wahyuni, 2009). Pariwisata berbasis masyarakat sering dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan dengan pariwisata skala besar), berbentuk paket,

pariwisata masal, dan minim keterkaitannya dengan masyarakat lokal (Adikampana, 2017). Tata Kelola pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk pengelolaan pariwisata yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama mulai dari tahap perencanaan pariwisata (Asy'ari, Tahir, Rakhman, & Putra, 2021). Prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan salah satunya ialah memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Bahkan, dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yakni dalam ketentuan Pasal 5 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Tabel 1. Karakteristik Segmentasi Pasar di Kawasan Taman Wisata Alam Nasional Bantimurung

| No | Variabel Sosial Ekonomi | Segmentasi Pasar yang terjadi | Persentase Sebaran Kunjungan Objek Wisata (%) | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------|---|--------|----------|------------|
| | | | Air Terjun | Sungai | Goa Batu | Bukit Kars |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-Laki (58,96%) | 27,63 | 24,57 | 5,58 | 1,18 |
| | | Perempuan (41,04%) | 29,54 | 5,32 | 4,15 | 2,03 |
| 2 | Umur | 25 – 34 th (57,09%) | 27,56 | 17 | 8,74 | 3,79 |
| | | 15 – 24 (35,65%) | 24,47 | 5,61 | 3,87 | 1,70 |
| | | 35 – 44 (5,93%) | 3,26 | 2,67 | - | - |
| | | 45 – 54 (1,33%) | 1,33 | - | - | - |
| 3 | Pendidikan | Perguruan Tinggi (49,65%) | 20,65 | 21,81 | 4,16 | 3,03 |
| | | SLTA (48,76%) | 30,85 | 11,89 | 6,02 | - |
| | | SLTP (1,59%) | 1,59 | 0,95 | - | - |
| 4 | Pekerjaan | Wiraswasta (51,82%) | 30,87 | 20,95 | - | - |
| | | Pegawai Negeri (21,87%) | 13,48 | 8,39 | - | - |
| | | Mahasiswa (17,45%) | 7,65 | 2,81 | 3,98 | 3,01 |
| | | Pelajar (8,86%) | 5,65 | - | 1,47 | 1,74 |
| 5 | Pendapatan | <Rp.500.000 (15,06%) | 7,52 | 4,12 | 2,18 | 1,24 |
| | | > Rp.1.000.000 (35,16%) | 20,75 | 8,95 | 2,82 | 2,64 |
| | | Rp 500.000 s/d Rp.1.000.000 (49,78%) | 41,63 | 9,17 | - | 1,02 |
| 6 | Asal Pengunjung | Makassar (61,90%) | 28,7 | 22,68 | 6,67 | 3,81 |
| | | Warga Negara Asing (Maros (27,62%) | 15,24 | 7,86 | 3,81 | 0,95 |
| | | Lain-Lain (10,48%) | 4,76 | 2,86 | 2,86 | 0 |

Tabel Identifikasi Kepentingan dan pengaruh pariwisata terhadap kepentingan Stakeholders di Taman Wisata Alam Bantimurung

| Pihak yang berkepentingan (stakeholders) | Kepentingan | Efek pariwisata terhadap Kepentingan |
|---|--|--------------------------------------|
| Masyarakat lokal | Membuka kesempatan kerja | + |
| | Meningkatkan pendapatan | + |
| | Menjual hasil usaha | +/- |
| Pengusaha wisata | Pengembangan usaha | + |
| | Peningkatan omset usaha | + |
| Operator kawasan wisata | Penggalian potensi wisata | +/- |
| | Peningkatan kreativitas masyarakat | +/- |
| Koperasi Bulusaraung | Pengaturan operator wisata | + |
| | Pengkoordinasian operator wisata | + |
| Pemerintah Dinas Pariwisata | | |
| | Pemberian izin dan pengawasan usaha pariwisata | + |
| | Peningkatan jumlah pemasukan dari retribusi usaha pariwisata | + |
| Dinas Perkebunan dan Kehutanan | Pelestarian kawasan hutan | + |
| Lembaga Lokal Masyarakat Karang Taruna | Pengembangan SDM pemuda | + |

Peran stakeholder atau pemangku kepentingan, merupakan dasar dari keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat. Namun, persoalan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat ialah terkadang terdapat Keenganan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata juga merupakan salah satu kendala yang kerap kali terjadi (Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. I. (2019). Selain hal tersebut, pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan tidak hanya memiliki keunggulan, tetapi memiliki beberapa kelemahan juga, misalnya masyarakat lokal tidak memiliki visi dan misi dalam perencanaan jangka panjang dan tidak memiliki cukup modal untuk membangun secara cepat (Wijaya & Sudarmawan, 2019). Keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga membutuhkan sinergitas antara setiap sektor dalam pengembangan kawasan pariwisata yang ada. Peran stakeholder atau pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah sangat berperan penting (Rifqi Asy'ari dkk, 2021). Pemerintah

berperan penting dalam mengawasi pengembangan produk pariwisata, terutama desa wisata dan membantu mengembangkan serta promosi pasar (Effendi & Prastiyo, 2020). Sehingga pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini juga berperan dalam meningkatkan dan membangun kesadaran masyarakat melalui beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya yakni dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/ UM.001/ MKP/2010.

Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata muncul sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat juga dapat turut serta secara aktif sebagai pelaku wisata. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Tidak dipungkiri masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata (Adikampana, 2017). Sehingga masyarakat setempat juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan industry pariwisata.

Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata dapat diketahui bahwa tujuan utama dari PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Bahkan program nasional ini juga bertujuan untuk meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin, meningkatkan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat, dan membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata. Sehingga dengan adanya peran aktif atau partisipasi masyarakat diharapkan dampak positif dari perkembangan industri pariwisata juga dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat diketahui bahwa Pariwisata Melalui Desa Wisata Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam PNPM Mandiri meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan saja,

masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi (Dewi, 2013). Masyarakat memiliki peran yang besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya berkaitan dengan penentuan arah kepariwisataan. Bahkan masyarakat dapat berpartisipasi penuh yang dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan pariwisata, dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi berbagai dampak pariwisata dan kemudian merumuskan strategi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata (Adikampuna, 2017). Bahkan terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya di Sulawesi Selatan khususnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 dapat diketahui bahwa arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Peraturan Daerah kabupaten Maros Nomor 1 tahun 2022 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Maros Tahun 2022-2025 arah pembangunan kepariwisataan tersebut dijadikan dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Maros.

Arah kebijakan strategi pembangunan destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan meliputi program pembangunan destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pembangunan industri pariwisata serta program pembangunan kelembagaan pariwisata. Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam program ini. Dolezal, C., & Novelli, M. (2020) program pembangunan destinasi wisata meliputi kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata, perbaikan kualitas destinasi pariwisata, monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, pengembangan destinasi melalui inter island policy forum dan penyusunan data usaha pariwisata. Kemudian, program pemasaran pariwisata meliputi analisa pasar untuk promosi dan pemasaran, pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri, pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik, kerjasama antar provinsi khususnya di bidang kepariwisataan melalui mitra praja utama. Program pembangunan industri pariwisata meliputi, mengendalikan usaha jasa kepariwisataan, mengendalikan usaha sarana kepariwisataan, mengendalikan usaha daya tarik wisata. Program pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan, fasilitasi sertifikasi kompetensi dan fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata (Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K., 2018)..

Pariwisata berbasis masyarakat memiliki peranan yang besar dalam pengembangan pariwisata khususnya berkaitan dengan mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley dalam (Adikampana, 2017)). Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memerhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan (Kemenparekraf/ Baparekraf RI, 2022). Prinsip keberlanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dari pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus dibangun antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang United Nation Environment Programme World Tourism Organization, 2005).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didukung dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat (Musaddad et al., 2009). Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan haruslah memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat dan memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan terdistribusi secara adil pada seluruh stakeholders (Wijaya & Sudarmawan, 2019). Sehingga dengan adanya pariwisata berbasis masyarakat diharapkan dapat meminimalisir munculnya dampak negatif dari perkembangan industry pariwisata. Namun untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan juga membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder baik masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pengusaha pariwisata.

SIMPULAN

Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada peran atau partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Bahkan salah satu tujuan dari pariwisata berbasis masyarakat ini ialah untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat setempat memiliki peran yang penting mewujudkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Selain peran aktif dari masyarakat yang merupakan perwujudan dari model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism), membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pengusaha pariwisata juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana, I. M. (2017). *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar: Cakra Press
- Amalyah, R. et al. 2016. "Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari." *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 37.1, pp. 158–163.
- Arifin A.P.R. 2017. Pendekatan Community Based Tourism dalam Membina Hubungan Komunitas di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Visi Komunikasi*, 16(01), 111–130.
- Asia Pasific Economic Cooperation. (2009). *Handbook on Community Based Tourism, How to Develop and Sustain CBT*. SOM Steering Committee on Economic and Technical Cooperation (SCE), Tourism Working Group (TWG). Retrieved from <https://www.apec.org/publications/2009/12/handbook-on-communitybased-tourism-how-to-develop-and-sustain-cbtdecember-2009>.
- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2016). *ASEAN Community Based Tourism Standard*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 47–58. Retrieved from <http://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/292>
- Blackwell.
- CIFOR. 2004. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. CIFOR. Bogor.
- Cohen, Erik. (1984). *The Sociology of Tourism: Approches, Issues, and Finding*. California: Annual Review of Sociology, Vol. 10. Sumber : repository.ugm.ac.id/downloadfile/. Akses 12 April 2022.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistara : The Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2). Retrieved from <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia. 2009. Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia. Jakarta.
- Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K. (2018). Mobilizing knowledge: Determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. *Current Issues in Tourism*, 21(13), 1547-1568.
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2020). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 1-19.
- Effendi, D., & Prastiyo, E. B. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Neo Societal*, 5(4). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.52423/jns.v5i4.12739>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. John Wiley & Sons.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Grasindo: Jakarta.
- Kemenparekraf. (2020). *Rencana Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024*.
- Kemenparekraf/ Baparekraf RI, 2022, [https:// www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7-Desa-Wisata-yang-Mengusung-KonsepSustainable-Tourism](https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7-Desa-Wisata-yang-Mengusung-KonsepSustainable-Tourism) Kemenparekraf/

- Baparekraf. (2022). *Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia*, diakses pada tanggal 1 Juli 2022 URL: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Outlook Pariwisata& Ekonomi Kreatif Indonesia*.
- Mayzona.com 2014. <http://www.mayzona.com/wisata/item/948-pendapatanwisata-alam-bantimurung-capai-rp30-miliar>. akses tanggal 21 April 2022.
- Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supraptiningsih, & Wahyuni, E. (2009). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 2(1). Retrieved from <https://sasanti.or.id/ojs/index.php/jda/article/download/27/43>
- Nagy, K. X. H., & Segui, A. E. (2020). Experiences of community-based tourism in Romania: Chances and challenges. *Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico*, 27(2), 143-163.
- Priatmoko, S., Kabil, M., Purwoko, Y., & Dávid, L. D. (2021). Rethinking sustainable community-based tourism: a villager's point of view and case study in Pampang Village, Indonesia. *Sustainability*, 13(6), 3245.
- Putnam, R. (2000). *Social Capital: Measurement and Consequences*. Kennedy School of Government.
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1). Retrieved from <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.13111>
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1). Retrieved from <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.13111>
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Rest Project.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Rest Project. United Nation Environment Programme World Tourism Organization, 2005, *Making Tourism More Sustainable*, A Guide for Policy Makers.
- Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I. W. E. (2019). Community Based Tourism Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 77-98. Retrieved from <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i1.162>
- Yamashita, S. (2011). Community-Based Associations for Sustainable Tourism Development: Fostering Sustainable Development in Developing Countries. *Digitala Vetenskapliga Arkivet*. Retrieved from <http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A465809&dswid=578>
- Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. I. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. *Sustainability*, 11(9), 2506.
- Zielinski, S., Jeong, Y., & Milanés, C. B. (2021). Factors that influence community-based tourism (CBT) in developing and developed countries. *Tourism Geographies*, 23(5-6), 1040-1072.